

# GLOBALISASI

## Karakteristik & Implikasinya<sup>1</sup>

*Riza Noer Arfani, MA<sup>2</sup>*

### LISENSI DOKUMEN

Copyright © 2004 Riza Noer Arfani. **Lisensi Al-Manär.**

- Penggandaan maupun penyebarluasan untuk kepentingan pendidikan dan bukan komersial diijinkan dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.
- Modifikasi artikel atau penggandaan serta penyebarluasan artikel ini untuk kepentingan komersial mensyaratkan permohonan ijin secara tertulis kepada penulis melalui redaksi Digital Journal Al-Manär atau secara langsung kepada penulis.

Globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Pertukaran barang dan jasa, pertukaran dan perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, migrasi dan berbagai fenomena *human trafficking* lainnya yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun. Pendek kata, komunitas domestik atau lokal kini adalah bagian dari rantai perdagangan, pertukaran ide dan perusahaan transnasional.

Yang perlu diperhatikan adalah implikasi dari kecenderungan-kecenderungan itu. Kita perlu memperhatikan munculnya *global governance* yang mengatur berbagai kecenderungan tadi. Dalam bidang perdagangan, pemerintah nasional kita adalah anggota dari WTO (*World Trade Organization*) yang terikat dengan aturan-aturan yang diratifikasi di dalamnya.

Dalam hal perburuhan kita juga adalah anggota ILO (*International Labor*

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam forum diskusi 'PubDisc Sciences' tentang 'Globalisasi' di FISIPOL UGM Sabtu, 19 April 2003

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM

*Organization*) yang semakin memperhatikan prinsip-prinsip penerapan HAM dalam kehidupan kaum buruh. Demikian pula dalam isu-isu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, kita termasuk salah satu negara yang menandatangani Protokol Kyoto yang mengatur pengurangan emisi karbon dan sejumlah gas lainnya yang mengancam keberadaan ozon dan menimbulkan efek pemanasan global.

Melihat implikasi yang isunya begitu beragam tetapi begitu mendalam dan spesifik konteks persoalannya, globalisasi bukanlah fenomena hitam putih yang bisa secara mudah dan cepat dikelola. Fenomena ini berada di sekitar dan bahkan *embedded* dengan berbagai kepentingan kita. *Global governance* di berbagai area -yang sebagian sudah disebut tadi- tidak saja menggambarkan kompleksitas persoalannya, tetapi juga sekaligus menawarkan ide atau bahkan aturan main alternatif untuk mengelola dan menyelesaikan persoalan-persoalan di seputar isu-isu itu.

Eksplorasi berbagai ide, inisiatif dan tindakan yang berasal dari kalangan domestik atau lokal (*local genuines*) oleh karenanya perlu secara serius dilakukan agar pertentangan global versus lokal tidak menemukan jalan keluar yang ekstrim, yaitu *either simply 'join the club' or 'go to hell with globalization'*. Proses 'glokalisasi' yang menggabungkan arus globalisasi dari atas dengan berbagai tradisi, nilai atau ide lokal adalah salah satu tema yang perlu mendapat kajian mendalam.

Dalam sejumlah studi, proses ini tidak hanya mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang berorientasi ke politik dan pasar global, tetapi juga kecenderungan fragmentasi kultural dan sosial yang bermuara pada penemuan kembali (*reinvention*) tradisi-tradisi dan identitas lokal. Eropa adalah salah satu contoh di mana pusaran pasar dan politik global tidak serta merta menghilangkan identitas lokal. Ketika Belgia mendesentralisasi proses dan kegiatan politiknya, Catalonia pada saat yang sama mendapatkan otonomi yang lebih besar.

Proses *globalization from below* dengan demikian perlu dikembangkan untuk menandingi dan sekaligus mendampingi proses hiper-globalisasi yang selama ini digambarkan secara amat menakutkan. Pertanyaannya: bagaimana melakukan itu?

Pada level negara/pemerintah, proses itu bisa dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dituntun oleh strategi penyesuaian yang cocok untuk merespon perubahan-perubahan di tingkat global. Penelitian oleh Nanang Pamuji Mugasejati dkk. (Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM & Balitbang Deplu, 2000)

merekomendasikan 5 (lima) strategi penyesuaian yang secara teoretik bisa diadopsi. Rekomendasi ini ditawarkan setelah terlebih dahulu mengidentifikasi 2 (dua) macam rute yang selama ini dilalui ketika perubahan-perubahan di tingkat global mempengaruhi tingkah laku negara dan masyarakat di tingkat domestik.

**Rute pertama** menggambarkan proses perubahan di tingkat global yang menyebabkan munculnya institusi internasional. Institusi ini kemudian memiliki peluang untuk mempengaruhi negara dan masyarakat domestik. Di rute yang pertama ini peran lembaga-lembaga formal antar-negara di tingkat internasional adalah sentral.

**Rute kedua** menggambarkan proses perubahan di tingkat global yang menyebabkan munculnya institusi trans-nasional. Institusi ini kemudian mempengaruhi terutama masyarakat domestik tetapi juga negara. Di rute yang kedua inilah kita melihat peran komunitas internasional, seperti komunitas epistemik, dalam mempengaruhi masyarakat domestik.

Berikut ini 5 (lima) strategi penyesuaian yang diajukan. **Pertama**, strategi otonomi nasional. Dalam strategi ini mengurangi dalam jumlah besar atau bahkan menghentikan sama sekali kontak dengan dunia internasional yang dianggap akan membahayakan kedaulatan dan otonomi dalam pengambilan kebijakannya. Dalam bidang ekonomi, kasus Kuba dan Korea Utara adalah contoh ekstrim ketika mereka mengambil jalan isolasi. Dalam isu non-ekonomi, seperti hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi, sejumlah negara membuat kebijakan yang membatasi warganya terhadap akses informasi atau partisipasi politik guna mencegah intervensi nilai-nilai global.

**Strategi kedua** adalah pengakuan timbal balik (*mutual recognition*). Strategi ini masih menyisakan keputusan atau kebijakan politik sebagai otoritas negara, akan tetapi menyerahkan proses integrasi ekonomi domestik ke dalam pasar internasional ditentukan oleh kekuatan pasar. Negara berusaha menciptakan kebijakan yang sesuai dengan keinginan pasar dan bekerjasama dengan negara lain dalam bentuk konsultasi yang tidak mengikat.

**Strategi ketiga** adalah koordinasi. Strategi ini menekankan pada pentingnya kerjasama antar-negara agar kebijakan nasional masing-masing bisa saling bersesuaian. Tujuannya menghindari *pay-off* yang tidak diinginkan bersama. Strategi ini mendorong negara untuk aktif dalam berbagai perundingan internasional yang berupaya membentuk institusi-institusi internasional dalam isu-isu tertentu.

**Strategi keempat:** adalah harmonisasi eksplisit (*explicit harmonization*) atau kolaborasi. Dalam strategi ini negara menerima adanya *joint-adjustment* dalam kebijakan nasionalnya. Di sini berlaku juga proses monitoring yang dilakukan oleh institusi internasional untuk menjamin adanya kepatuhan terhadap setiap kesepakatan yang berlaku. Ini berlaku secara substantif maupun prosedural. Kebijakan Negara yang menyesuaikan berbagai kesepakatan dalam bidang investasi internasional di Negara-negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) seperti termuat dalam MAI (*Multilateral Agreement on Investment*) adalah contoh penerapan kebijakan ini.

**Strategi kelima** adalah *federalist mutual governance*. Strategi ini mendorong negara untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada institusi internasional dengan membentuk suatu organ supra-negara. Uni Eropa dalam batas-batas tertentu adalah contoh sebuah institusi internasional yang memiliki organ-organ supra-negara untuk mengatur bidang-bidang tertentu. Salah satunya adalah rejim moneter yang menerbitkan dan mengatur peredaran mata uang Euro di negara-negara anggotanya.

**Terakhir**, pada level individual atau masyarakat, kita bisa mengadopsi strategi yang ditawarkan oleh Brechen & Costello (1994) yang mereka sebut sebagai ‘Strategi Liliput’. Strategi ini menekankan pada aksi non-negara atau non-pemerintah yang bisa dilakukan oleh para aktivis masyarakat, buruh, akademisi, pengusaha, partai politik, atau bahkan aparat negara yang *concern* terhadap proses globalisasi yang merugikan banyak kalangan masyarakat. Inilah *guidelines*-nya :

1. Linking self-interest with common interest
2. Linking the global to the local
3. Linking North and South
4. Linking constituencies across borders
5. Linking particular interest with wider commonalities
6. Linking issues and constituencies
7. linking the threatened with the marginalized
8. Linking different power sources
9. Linking struggle against targeted institutions
10. Linking resistance with institutional change
- I 1. Linking economic issues and democratization

Riza Noer Arfani. Alumnus HI UGM tahun 1992. Semasa mahasiswa pernah aktif di Jama'ah Musholla Fisipol (JMF). Meraih gelar MA dari Syracuse University, USA, pada tahun 1996. Sekarang dosen tetap merangkap sebagai sekretaris Jurusan HI UGM. Aktif juga di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK). Tulisannya banyak dimuat di beberapa surat kabar dan Jurnal Ilmiah.

# *KAPITALISME & NEOLIBERALISME*

## Sebuah Tinjauan Singkat<sup>3</sup>

*Oleh: Eko Prasetyo*

Keberatan terbesar kalangan mahasiswa terhadap pemotongan subsidi ditengarai karena kebijakan yang ada di balik itu didasarkan pada kepatuhan atas ajaran yang tertuang dalam ideologi neo-liberalisme. Yang terpokok dari ideologi neo-liberalisme adalah dikarantinanya peran sosial negara dan menjadikan pasar bebas sebagai kiblat dari semua transaksi ekonomi. Kedua kecenderungan ini membawa akibat serius bagi kehidupan mayoritas rakyat yang masih berada dalam krisis. Segala kritik yang ditumpahkan oleh sejumlah aktivis tidak mengurangi keyakinan penguasa untuk tetap menerapkan ideologi neo-liberalisme dalam berbagai proyek pembangunan. Kerasnya suara perlawanan di tingkat akar rumput ini telah memperluas wacana ideologi neo-liberalisme pada semua komunitas masyarakat sipil. Aksi penentangan yang tidak percuma mengingat saat ini, banyak kalangan mulai kembali menelaah, apa sesungguhnya yang ada di balik ideologi neo-liberalisme dan bagaimana kiprahnya. Sejarah tentang pergerakan modal tak lagi ditatap sebagai soal ekonomi semata akan tetapi juga ditinjau dari sudut politik, sosial bahkan persentuhannya dengan keyakinan agama. Dinamika konflik antara modal dengan negara saat ini menemukan babak baru dan melaluinya beberapa teori perubahan sosial kini dirumuskan.

Dalam paparannya, Anthony Giddens menyatakan kalau modernitas disangga oleh kekuatan kapitalisme, negara bangsa, organisasi militer dan industrialisasi. Kapitalisme merujuk pada sejumlah prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam konteks pasar produksi dan tenaga kerja yang kompetitif. Sedang negara-bangsa menunjuk pada prinsip struktural yang mengoordinasi praktik kontrol atas informasi, supervisi sosial dan pemata-mataan. Lalu militerisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik pengontrolan atas alat-alat kekerasan dalam konteks industrialisasi perang. Akhirnya industrialisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik-praktik yang bertujuan untuk mengubah alam atau pembangunan lingkungan non alami<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Disampaikan untuk PubDisc (Public Discussion) SCIENCES, 19 April 2003

<sup>4</sup> Lih B Herry Priyono, *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*, KPG, 2003

Keempatnya merupakan tulang punggung yang menghamba pada modernitas dan darinya proses transformasi sosial masyarakat bekerja. Dalam konteks perbincangan kali ini, kapitalisme kiranya menjadi sistem yang berkait-erat dengan proses berjalannya modal. Kapitalisme membawa dunia pada sistem perekonomian yang tunduk pada norma serta aturan pasar. Terobosan kapitalisme adalah membentuk sistem pasar yang hegemonik dimana kekuasaan privat juga memiliki kemampuan untuk mencipta pengaruh pada kawasan publik. Mengapa kekuatan kapitalisme bisa sejauh itu dampaknya?

Adam Smith adalah peletak dasar pemikiran kapitalisme yang menjelaskan bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi<sup>5</sup>. Melaluinya, kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap komoditi. Ukuran riil dari nilai tukar komoditi, harus dilihat dari kondisi pertukaran, dimana 'ukuran riil' dari nilai komoditi adalah kuantitas dari kerja yang berada dalam barang-barang lain yang dapat dipertukarkan di pasar. Tokoh berikutnya yang penting adalah David Ricardo, yang melakukan kritik terhadap Adam Smith, terutama yang berkaitan dengan nilai komoditi. Menurutnya, nilai komoditi terdapat pada kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat-alat kerja. Ricardo menemukan bahwa komoditi yang dijual pada harganya, kira-kira akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Asumsinya satu-satunya nilai tukar, berawal dari jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi, Karenanya dari Ricardo-lah sifat parasit dari seluruh pendapatan yang tidak diperoleh dari kerja terbongkar, sebab darinya, kelak akan ditemukan apa yang dinamai dengan nilai lebih dan kerja lebih.

Kedua ilmuwan ini menjadi peletak dasar bagi ideologi kapitalisme awal dan mereka hidup pada masa transisi dari ekonomi subsisten menuju pada sistem ekonomi pasar, yang mengandalkan pada laba. Sejumlah ilmuwan kemudian memberikan pendasaran historis tentang masa peralihan ke kapitalisme ini dengan ditandai oleh sejumlah indikator: pertama meningkatnya output pertanian yang bersamaan dengan pemisahan petani-petani dari tanahnya, kedua pertumbuhan produksi komoditi dan

---

<sup>5</sup> Kalimat yang populer dari Adam Smith "*Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir atau tukang rot!*", kita mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas kepentingan din mereka masing-masing. Kita camkan dalam din kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dan rasa cinta terhadap diri-sendiri; dan tak akan kita berbicara pada mereka mengenai kebutuhan-kebutuhan kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka rain' Lih Bonnie Setiawan, *Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga*, Insist Press, 1999

pembagian kerja, ketiga akumulasi modal oleh pedagang dan petani kaya. Paul Baran menyatakan bahwa kapitalisme terbentuk ketika terjadi akumulasi modal dalam bentuk modal dagang yang kemudian menjadi dasar ekspansi Eropa dimana negara memberikan dukungan terhadap kompetisi. Dengan demikian, Baran melihat perkembangan kapitalisme sebagai perkembangan di satu wilayah dengan mengorbankan wilayah-wilayah lainnya. Baran berjasa dalam meletakkan dasar-dasar eksploitasi kapitalisme yang dilanjutkan oleh sejumlah teoritis neo marxis yang menjelaskan tentang bagaimana ekspansi kolonial ini telah membawa ketergantungan pada sejumlah negara. Ekspansi kolonial ini juga memperkenalkan kemajuan dari organisasi militer, yang oleh Amartya Sein, telah membawa pada dua tingkat; pertama karakter massal tuntutan militer telah merangsang rasionalisasi proses produksi dan kedua tentara itu sendiri merupakan model bagi organisasi industri dan organisasi sosial.

Tapi Perang Dunia II telah mendorong upaya untuk penyusunan kembali pemikiran ekonomi yang kemudian melahirkan ekonomi pembangunan, Gunnar Myrdal menyatakan gagasan pembangunan ini dilatarbelakangi oleh: pertama likuidasi kekuasaan struktur kolonial yang cepat, kedua adanya harapan akan perkembangan di negara-negara terbelakang itu sendiri, ketiga ketegangan internasional, yang memuncak pada perang dingin, yang membuat nasib negara-negara terbelakang menjadi keprihatinan kebijakan luar negeri.<sup>6</sup> Pasca Perang Dunia II ini telah membawa upaya beberapa negara, terutama Amerika, untuk memimpin proses rekonstruksi. Instrumen untuk ini ada dalam program besar-besaran yang dinamai dengan *Marshal Aid* yang bertujuan ganda, pertama untuk menjalankan ekonomi dunia (menurut sistem Bretton Woods) dan menahan laju komunisme. Paling tidak, ada tiga pilar di balik pemunculan teori pembangunan, yakni; pertumbuhan, perencanaan dan bantuan. Dalam pengertian Gramscian, tatanan dunia pasca perang -yang memunculkan gagasan pembangunan- ini sangat hegemonik. Mengingat, *pertama* secara gemilang AS berhasil mendefinisikan kepentingan korporasi ekonominya dalam sebuah kerangka global dan bersedia memikul beban kepemimpinan. *Kedua* kepemimpinan AS atas sekutu-sekutu Eropa tidak semata-mata dibangun di atas dominasi ekonomi, politik atau keunggulan militer, tetapi lebih didasarkan pada konvergensi kepentingan dan sikap elite di negara-negara itu, dan semakin meningkatnya penerimaan visi internasionalis liberal AS mengenai ekonomi dunia yang terbuka yang

---

<sup>6</sup> Lih Bjorn Hettne, *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, Gramedia, 2001



dirancang menguntungkan para pesertanya, meski tidak seimbang<sup>7</sup>.

Tapi, proyek ini ternyata membawa kegagalan serius, sebagaimana yang dinyatakan oleh berbagai kalangan, pertumbuhan dengan tanpa pembangunan tetapi dengan kemiskinan. 1-1 Cheners menyatakan "sekarang jelas bahwa lebih dari satu dekade, pertumbuhan yang pesat di negara-negara terbelakang menghasilkan sedikit sekali keuntungan bagi sekitar sepertiga penduduknya". Yang lebih berbahaya dampak dari adopsi kebijakan pembangunan adalah timbunan hutang yang ada di negara-negara berkembang. Karenanya, diperlukan sebuah strategi baru, yang kemudian dikenal dengan neo-liberalisme. Pada dasarnya neo-liberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neo-liberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar. Sehingga ketika Indonesia terjatuh pada krisis, neo-liberalisme memberikan beberapa penjelasan tentang sebab-musababnya<sup>8</sup>. Pertama krisis terjadi karena kebijakan makro yang diterapkan sehingga krisis dipandang dalam konteks *balance of payment* (depresiasi uang, jatuhnya nilai tukar) kedua *financial panic* yakni kepanikan nasabah Bank, ketiga *Bubble Colaps* atau model balon mengempis karena perilaku para spekulator, keempat *moral hazard crisis* terhadap institusi perbankan dan terakhir *disorderly workout* yakni kekacauan terjadi ketika peminjam tidak lancar memprovokasi kreditor untuk berlomba dan memaksa likuiditas.

Itu sebabnya kehadiran IMF menjadi diperlukan terutama ketika banyak negara tidak mampu membayar hutangnya kembali. Semula Meksiko yang gagal membayar hutangnya yang jatuh tempo pada tahun 1982. IMF, pada saat Meksiko mengalami masalah, diperlukan untuk membantu menyelamatkan neraca pembayaran dan mengatur perundingan restrukturisasi utang dengan kalangan Perbankan International. Perannya menjadi kian penting saat Asia memasuki krisis terberatnya pada dekade 1997 dimana IMF mencoba ikut memecahkan. Salah satu program IMF yang populer dinamakan dengan SAP (*Structural Adjustment Program*) yang didasarkan atas keyakinan bahwa sektor swasta lebih efektif, dinamis dan bereaksi lebih baik terhadap ekonomi pasar daripada

---

<sup>7</sup> Lih Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, 1999

<sup>8</sup> Lih Mansour Fakh, *Sesat Pikir Teori Pembangunan 6' Globalisasi*, Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001

sektor pemerintah. Karenanya IMF selalu mendorong setiap negara untuk berintegrasi dalam pasar dunia melalui beberapa kebijakan, diantaranya<sup>9</sup>: *pertama* menurunkan nilai tukar mata uangnya agar lebih kompetitif, *kedua* mengurangi hambatan-hambatan perdagangan sehingga mendorong industri lokal lebih kompetitif dalam menghadapi produk impor yang lebih murah, *ketiga* memberikan insentif ekspor seperti keringanan pajak dan subsidi keuangan, *keempat* merangsang investasi asing dengan menciptakan wilayah perdagangan bebas atau memberikan pembebasan pajak. Di samping sejumlah program ini juga ada sejumlah bantuan yang berada di bawah program-program IMF yang tetap konsisten dengan paradigma utamanya, yakni mencebur dalam mekanisme pasar bebas.

Peran IMF yang terpenting adalah melakukan liberalisasi finansial dan ini sepenuhnya mendapat dukungan penuh Amerika. Bill Clinton yang menetapkan ekonomi sebagai fokus kebijakan luar negerinya membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang kedudukannya setara dengan Dewan Keamanan. Liberalisasi Finansial yang dipaksakan pada semua negara tentu memiliki efek yang membahayakan. Apalagi ketika kebijakan Liberalisasi Keuangan ini mendapat dukungan besar dari NATO, yang memiliki tujuan untuk menyebar-luaskan keamanan dan stabilitas yang dinikmati Eropa Barat sejak Perang Dunia II ke Eropa Tengah dan Timur. Penyebarluasan tersebut akan menciptakan prospek yang bagus untuk menarik investasi. Bahkan Cohen menyatakan, strategi pemerintah untuk menentang “kekerasan dan instabilitas-instabilitas yang membahayakan nyawa manusia dan pasar”<sup>10</sup> Tentu kebijakan ini sudah tentu akan membawa dampak yang muram, terutama ketika dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan pertama kali oleh, John Maynard Keynes. Dikatakan, liberalisasi kapital akan merampas kemampuan negara untuk melaksanakan kebijakan ekonomi yang independen. Keynes selalu menganggap pasar itu sesungguhnya bersifat irasional. Tetapi, nampaknya Amerika bersikukuh untuk tetap menyakini akan liberalisasi pasar. Dalam laporan sub-komite senat dikatakan, teologi yang menggerakkan sistem ini adalah keyakinan tak tergoyahkan terhadap pergerakan modal bebas tanpa batasan atau regulasi. Tujuan kebijakan AS adalah untuk memastikan keamanan dan mobilitas modal. Sebuah keyakinan yang mesin utamanya adalah IMF dan kekuasaan otoriter ini tentu memiliki, sejumlah kelemahan-

---

<sup>9</sup> Carol Welch, *Panduan Mengenai IMF*, INFID Jakarta

<sup>10</sup> William K Tabb, *Tabir Politik Globalisasi*, 2003, Lafadi, Yogyakarta

kelemahan serius.

Tentu ada sejumlah kelemahan-kelemahan yang ada dalam IMF saat menjalankan programnya. Kritikan utama yang selalu muncul adalah cara kerja IMF yang sangat tertutup dan andaikan ada informasi maka itupun informasi yang sangat sepele. Kritik lain adalah tidak adanya akuntabilitas dan evaluasi terhadap sejumlah program IMF. Apalagi IMF selalu mengaku sebagai lembaga antar pemerintah sehingga tidak merasa perlu bertanggung jawab kepada publik. Akuntabilitas dan evaluasi tidak terjadi karena IMF selalu menghindari berurusan dengan wakil pemerintah dari kalangan yang lebih luas, dengan berdalih pada artikel V statuta-nya, yang menyatakan bahwa kementerian keuangan dan para pejabat Bank Sentral adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan IMF. Di sisi lain pendekatan IMF terhadap persoalan tenaga kerja benar-benar mengacu pada pasar, fleksibilitas tenaga kerja akan memberi rangsangan bagi bisnis dan penanaman modal yang pasti akan mendorong kenaikan upah maupun perubahan iklim kerja jika negara terus berkembang. Dampak pendekatan ini yang menyolok adalah melejitnya angka pengangguran. Selain itu juga yang tak kalah hebohnya, perhatian IMF pada perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan ekspor telah 'berhasil' merusak lingkungan. Mengingat sejumlah kelemahan-kelemahan diatas itu pulalah maka ada kritik bahkan tuntutan untuk membubarkan saja institusi ini.

Tuntutan yang makin mengeras ini telah mengetuk Washington untuk kembali memikirkan strategi penaklukan sejumlah gerakan oposisi. Diantara taktik yang diterapkan adalah<sup>11</sup> (1) Washington berusaha memecah-belah oposisi anti diktator dengan mendanai dan mengatur kelompok borjuis liberal sambil mengisolir dan mendemobilisasi gerakan-gerakan kerakyatan sayap kiri (2) Washington mengkampanyekan transisi hasil negoisasi antara liberal borjuis dan militer yang akan mempertahankan kekuatan bersenjata, memperkuat kebijakan-kebijakan "pasar bebas" dan memperkenalkan pemilihan umum. Kemunculan sejumlah ornop yang menggerakkan agenda demokratisasi sebenarnya dilandasi oleh motif itu, karenanya beberapa kalangan mulai menggulirkan beberapa kritik, yang berkisar pada; pertama ornop telah menjadi tempat berteduh yang nyaman bagi sejumlah intelektual yang ingin 'bertahan hidup', kedua kegiatan ornop telah menjadi komoditas yang berorientasi semata-mata pada proyek yang bisa 'dijual', ketiga ornop menjadi lowongan kerja tersendiri yang memiliki potensi untuk menampung tenaga kerja.

---

<sup>11</sup>Lih James Petras dan Heltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, Kreasi Wacana, 2002

Ringkasnya, gerakan ornop telah menjadi kekuatan proyek dan lama-kelamaan memang tidak lagi berorientasi gerakan. Dalam kaitan inilah, proyek neo-liberalisme ditegakkan, di tengah lesunya gerakan kerakyatan dan buasnya kekuatan swasta yang hendak menggantikan kuasa dari pemerintah.

Dengan mempertimbangkan itu semua, kiranya ada fungsi dan mandat yang bisa dilakukan oleh LDK (Lembaga Dakwah Kampus). Pertama yang teramat penting adalah mendorong kesadaran kritis mengenai apa itu kapitalisme. LDK harus mampu untuk menjelaskan dalam bahasa yang komunikatif pada publik mengenai apa itu kapitalisme, mengingat ancaman yang dibawanya sekaligus korban yang berjatuh akibat penerapan ideologi ini. Kalau perlu 'motif' penghancuran dari sistem ekonomi yang kapitalistik ini dibaca dalam konteks semangat moral. Tujuannya sederhana, agar persoalan kapitalisme ini tidak melulu dihadapi sebagai soal ekonomi melainkan juga pada tataran nilai. Kedua tak kalah pentingnya adalah mulai merintis jaringan bukan lagi berdasarkan atas 'kesamaan iman' saja melainkan juga atas basis kesamaan pada persoalan sosial. LDK perlu lebih mengintensifkan hubungan dengan berbagai kekuatan anti kapitalisme yang mungkin dapat menyediakan sejumlah data, informasi bahkan wacana mengenai kapitalisme ini. Jaringan ini menjadi mudah saat ini, terutama dengan berkembang-luasnya gerakan anti kapitalisme belakangan ini. Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah mengaktifkan kembali kegiatan advokasi, yang tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan sekuler, melainkan kegiatan pembelaan terhadap kaum yang dianiaya. Usaha untuk ini perlu ditempuh mengingat krisis yang berpekepanjangan ini, tak lagi bisa dilihat sebagai ancaman sosial melainkan juga ancaman akan runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Berangkat dari sana nampaknya, orientasi LDK yang selalu mendorong pembentukan komunitas atau masyarakat yang berakhlak mulia perlu ditambah dengan mandat, penciptaan masyarakat yang adil dan egaliter. Cita-cita ideal yang kini sedang dirusak oleh sistem Kapitalisme maupun oleh sistem globalisasi.

\*\*\*\*\*

Eko Prasetyo, adalah alumnus Fakultas Hukum Ull tahun 1997, kemudian melanjutkan studi S2 di fakultas dan universitas yang sama, namun tidak selesai. Mengawali "karir" dengan menjadi guru TPA di Kota Gede dan pernah jadi kepala sekolah TPA di kampung Pujokusuman Yogyakarta. Pernah menjadi bagian dan kepanitiaan ramadhan di Masjid Syuhada Kota baru dalam Training Keluarga Sakinah. Selain aktif di Insist Press, Pusham Ull dan redaksi tetap Jurnal Wacana, sempat juga menjadi anggota Tim Pembela Muslim untuk advokasi hukum Laskar Jihad dan pernah menulis beberapa artikel untuk tabloid Laskar Jihad. Beberapa tulisannya dalam bentuk buku telah diterbitkan antara lain: *HAM: Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal (2001)*, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal: dari Wacana Menuju Gerakan (2002)*, dan *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global (2003)*. Pengalaman lainnya yang menarik adalah pernah menjadi produser untuk sebuah film dokumenter tentang Polisi DIY dan Masyarakat Transisi. Aktivitas di rumahnya yang terletak di desa Lemwulung di wilayah Bangun Tapan, Bantul, antara lain membaca novel roman, membaca puisi dan mengasuh anak bersama istri tercinta.